

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kelaparan di Korea Utara merupakan permasalahan domestik yang telah lama terjadi semenjak 1990 yang masih belum terselesaikan oleh pemerintah. Hal ini melibatkan aktor lain seperti organisasi internasional untuk mengatasi permasalahan tersebut. WFP merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang ketahanan pangan yang secara aktif memberikan bantuan ke Korea Utara. Bahkan ketika terjadi penurunan drastis dalam bantuan akibat terpengaruhnya pendonor terhadap kegiatan uji coba nuklir Korea Utara.

WFP sebagai sebuah organisasi internasional memiliki struktur dan mekanisme kerja yang mendasari setiap tujuan dan program yang dioperasikan di masing-masing negara target. Berdasarkan mandatnya, WFP dibentuk untuk terlibat dalam permasalahan ketahanan pangan dengan memberikan bantuan baik itu berupa bantuan mendesak ataupun pemberian bantuan pembangunan. WFP merupakan organisasi pemerintahan internasional di bawah PBB yang memiliki sifat otonomi dalam mengambil keputusan. Namun, dalam pelaksanaannya demi mencapai tujuan WFP bekerjasama dengan organisasi lain dan tidak menutup kemungkinan keterlibatan negara atau organisasi lainnya untuk menjadi partner donor bagi kegiatan WFP.

Dalam kasus kelaparan yang terjadi di Korea Utara ada beberapa faktor yang melatar belakangi mengapa permasalahan tersebut masih saja berulang terjadi. Sampai tahun 2006, bahkan setelah bantuan asing masuk, Korea Utara masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Letak

geografis yang menjadikan Korea Utara sulit untuk mengatasi dampak dari bencana alam yang terjadi dan meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Selain itu kebijakan pemerintah yang kurang memihak rakyatnya menjadikan usaha negara yang telah dilakukan untuk menekan masalah kelaparan menjadi tidak efektif. Apalagi ketentuan jatah makanan menyisakan perbedaan yang signifikan terhadap rakyat yang tinggal di kota dengan kemudahan akses mendapatkan makanan dengan rakyat yang tinggal di daerah yang memiliki hasil panen tapi malah menjadi bagian yang paling rentan terhadap kelaparan.

Karenanya, dalam permasalahan kelaparan dan ketidatangguhan pangan di Korea Utara ini maka dibutuhkan peran dari WFP dalam mengatasinya. Penelitian ini mendeskripsikan peran yang dilakukan oleh WFP dalam mengatasi kelaparan di Korea Utara yang dijelaskan melalui kerangka konseptual organisasi internasional di mana WFP berperan sebagai determinator, inisiator dan fasilitator. WFP sebelum menangani kasus kelaparan di Korea Utara dan ikut terlibat secara langsung dalam penanganannya, sebagai sebuah organisasi WFP berperan sebagai determinator. Di mana penting bagi WFP untuk mengidentifikasi dan menganalisis terlebih dahulu situasi dan kondisi ketahanan pangan serta memutuskan bahwa apa yang terjadi di Korea Utara merupakan salah satu fokus dan tujuan dari WFP.

Berdasarkan penggunaan konsep *food security* menguatkan dasar pengambilan keputusan WFP terhadap kelaparan dan krisis pangan Korea Utara pada tahun 2006-2012. Penyebabnya tidak hanya disebabkan oleh faktor ketersediaan pangan, namun juga dipengaruhi oleh kemudahan akses dan pemanfaatan makanan untuk kesehatan. Kelaparan dan krisis pangan ini juga

berkaitan dengan kebijakan dan ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi permasalahan bencana alam yang dihadapi negaranya dan kebijakan-kebijakan yang tidak memihak untuk kesejahteraan rakyat.

Berperan sebagai inisiator, WFP setelah melakukan penelitian berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan oleh staff membawa permasalahan kelaparan Korea Utara ke forum WFP di tingkat internasional dan secara aktif melakukan penggalangan dan pemberian bantuan. Hal ini juga terkait dengan peran WFP sebagai fasilitator yang memfasilitasi kebutuhan rakyat Korea Utara agar tetap hidup, terutama pada pihak-pihak yang rentan seperti wanita dan anak-anak.

WFP sebagai fasilitator berperan dalam mengatasi permasalahan kelaparan di Korea Utara melalui pemberian bantuan berupa *program aid* dan *project aid*. Di mana, bantuan yang diberikan terbagi pada bantuan jangka pendek dengan memberikan bantuan pangan dan bantuan jangka panjang berupa pembangunan dan pemulihan kembali pasca terjadi bencana alam. Bantuan yang diberikan WFP ditujukan untuk menunjang kegiatan rakyat Korea Utara dalam bidang pertanian dan kemudahan akses dalam pendistribusian hasil pertanian. WFP sebagai sebuah organisasi internasional memiliki tujuan akhir agar setiap negara bebas dari kelaparan, malnutrisi dan krisis pangan dan negara yang menjadi resipien bisa mampu secara mandiri memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa mengharapkan bantuan WFP lagi.

Namun, pada kenyataannya operasi program WFP di setiap negara berbeda. Korea Utara yang telah lama menerima bantuan tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan, terbukti dari pemberian bantuan yang masih dilakukan

setiap tahunnya, bahkan bantuan yang diberikan tidak bisa memenuhi semua kebutuhan rakyat.

Selain itu, Korea Utara dinilai tidak kooperatif dalam menjalankan program bantuan dari WFP karena sulitnya staff untuk masuk dan menjangkau ke setiap daerah. Hal ini dipengaruhi oleh pemerintah Korea Utara yang cenderung tertutup dan membatasi ruang gerak WFP di negaranya dengan menentukan beberapa aturan yang menghambat efektifitas program bantuan WFP. Tantangan selanjutnya adalah kegiatan pengembangan senjata nuklir Korea Utara yang menjadi topik sensitif di kalangan negara pendonor sehingga berdampak pada sulitnya WFP mencari bantuan pendanaan untuk menjalankan setiap programnya.

Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh WFP berusaha diminimalisir dengan penetapan beberapa kondisi dan negosiasi peraturan ke pemerintah Korea Utara. Penetapan kondisi tersebut tidak jarang dikaitkan dengan jumlah bantuan yang akan diberikan oleh WFP ke Korea Utara. Di mana, ketika bantuan yang diminta dalam jumlah yang besar, WFP menetapkan kondisi dengan persyaratan kemudahan akses untuk masuk dan mengumpulkan data.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai sebuah organisasi internasional WFP telah menjalankan perannya untuk terlibat dalam mengatasi kelaparan di Korea Utara. Namun, keberhasilan peran tersebut tidak hanya ditentukan oleh WFP sebagai pemberi bantuan tapi juga dipengaruhi oleh negara penerima yakni Korea Utara. Tanpa adanya kerja sama antara organisasi internasional dan partner lainnya dengan negara target maka permasalahan kelaparan dan krisis pangan akan sulit diatasi. Selain itu, sikap tidak kooperatif hanya akan berdampak pada proses pengumpulan dana untuk menjalankan

program WFP di Korea Utara dan tentunya berdampak pada semakin menderitanya rakyat Korea Utara.

5.2 Saran

Kelaparan dan krisis pangan merupakan permasalahan global yang menjadi perhatian bagi negara di dunia internasional. Keterlibatan organisasi internasional sebagai wadah bagi negara-negara anggota untuk mencari solusi dan mencapai kepentingannya diharapkan bisa mengatasi permasalahan tersebut. Kelaparan dan krisis pangan yang melanda beberapa negara berkembang memang disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda, namun hal ini perlu penanganan yang tepat dan mendesak untuk diselesaikan.

Negara memiliki kedaulatan untuk mengatasi permasalahan kelaparan dan krisis pangan rakyatnya. Ketika negara tidak mampu maka akan membuka ruang bagi pihak asing seperti organisasi internasional dalam hal ini WFP untuk terlibat. Jika demikian negara dituntut bisa memanfaatkan bantuan dan program yang dirancang oleh WFP dengan sebaiknya sehingga permasalahan kelaparan dan krisis pangan bisa diatasi.

Program-program kegiatan yang dirancang oleh WFP bertujuan untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kelaparan dan krisis pangan berlanjut. Rancangan kegiatan dan program bantuan ini tentunya tidak akan bisa tercapai tanpa adanya dukungan dari pemerintah sebagai pihak yang mau menerima bantuan. Negara sebagai resipien hendaknya mau bekerjasama dengan WFP sehingga penanganan permasalahan kelaparan dan krisis pangan di negaranya bisa diatasi dengan tepat dan cepat.